

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2025



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 . Menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 maka salah satu tahapan yang merupakan sistem perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah yakni penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025.

Rencana Kerja organisasi Perangkat daerah merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan disusun sebagai penjabaran Rencana dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasi program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

RENJA OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao periode 2020-2024, dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RENJA, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrembang Kabupaten.

Dokumen RENJA ini merupakan sub sistem penting sebagai input dalam penyusunan program dan penganggaran OPD yang merupakan dokumen publik, sehingga telah melibatkan semua stakeholders dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan APBD. Dengan demikian diharapkan dokumen RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 ini harus dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53 – 8801 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 030, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 118);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran

- Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);
 18. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0595); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 055).
 19. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan Tahun 2024;

2. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah;
3. Sebagai Pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao;
4. Sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 adalah memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2022 dan Capaian Renstra OPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao merupakan leading sector penyelenggaraan pelayanan transportasi , sarana dan prasarana serta penyebaran informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Rote Ndao.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Dinas Perhubungan. Renja juga sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Kinerja Pemerintah.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan serta hasil rencana program kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao 2022 menunjukkan bahwa capaian pelaksanaan rencana kerja Dinas Perhubungan pada Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan dana sebesar Rp.3.023.131.440,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.947.374.038,-,- atau (99,49 %) dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Operasi alokasi anggaran sebesar Rp. 2.713.831.440,- dengan realisasinya sebesar Rp. 2.638.391.038,- atau (97,22%).
 2. Belanja Modal alokasi anggaran sebesar Rp.309.300.000,- dan realisasinya sebesar Rp.308.956.000 ,- atau (99,89%).
- Belanja Daerah pada Dinas perhubungan tersebar dalam 3 (tiga) program dan 11 kegiatan (sebelas) dan 17 Sub kegiatan.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - 1.1. Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp.20.000.000,- realisasi Rp.20.000.000,- atau 100 %.
 - 1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp.10.000.000,- realisasi Rp.10.000.000,- atau 100 %
2. Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah dengan sub Kegiatan
 - 1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran sebesar Rp.1.699.535.440,- realisasi Rp.1.671.072.660,- atau 98,33%
 - 1.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD anggaran sebesar Rp.114.584.000 realisasi Rp.114.584.000 atau 100 %.
3. Kegiatan Administrasi barang milik daerah dengan sub kegiatan Pengaman barang Milik daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp.15.000.000,- realisasi Rp.15.000.000 atau 100%
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan pendataan dan pengelola administrasi kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp.390.000.000,- realisasi Rp.390.000.000,- atau 100 %.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan
 1. penyediaan Komponen Instalasi listrik dengan anggaran sebesar Rp.2.000.000,- realisasi Rp.2.000.000,- atau 100 %
 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan anggaran sebesar Rp.14.999.800,- realisasi Rp.14.746.800.000,- atau 98,31%
 3. Penyediaan Bahan Materil anggaran sebesar Rp.34.998.700,- realisasi Rp.34.930.700,- atau 99,81 %
 4. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD anggaran sebesar Rp.207.310.000,- realisasi Rp.206.198.000,- atau 99,46 %
6. Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah dengan sub kegiatan
 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat anggaran sebesar Rp.2.006.000,- realisasi Rp.2.000.000,- atau 99,70%

2. Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air listrik dan internet anggaran sebesar Rp. 26.918.000,- realisasi Rp.22.265.310,- atau 82,72%.
7. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran Rp.212.757.000,- realisasi Rp.206.481.468,- atau 97,05%.

II.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) :

1. Kegiatan pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Sub Kegiatan:
 1. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kab/kota dengan anggaran Rp.147.606.500,- realisasi Rp.147.507.500 atau 99,93%
 2. Rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal (fasilitas utama dan pendukung) dengan anggaran Rp.215.000.000,- realisasi Rp.213.895.500,- atau 99,49%
 3. Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan anggaran Rp.15.000.000,- realisasi rp.15.000.000,-atau 100 %.

III.Program Pengelolaan Pelayaran

Kegiatan pembangunan penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan local dengan sub kegiatan Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan Lokal dengan anggaran Rp.10.000.000,- realisasi Rp.10.000.000,- atau 100%.

Pada Dinas Perhubungan tidak mengalami Hambatan serta permasalahan dalam pencapaian target yang ditetapkan, disebabkan karena semua kegiatan sesuai dengan perencanaan yang dibuat antara lain:

- Pada belanja pegawai realisasi Rp.1.622.033.160 atau 98,28 %
- Pada belanja barang jasa terdapat realisasi Rp.1.016.357.878,atau 95,58 %
- Pada belanja modal realisasi Rp. 308.956.000 atau 100 % dengan presentase fisik 99,89 %

RENVIA 2023

TABEL T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024

N o	Kode				Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come)/Kegiatan (out Put)	Target kinerja capaian program (Renstra OPD) s/d Tahun 2024		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2021						Target Program dan kegiatan renja 2023				Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan								
											Target renja 2022				realisasi renja 2022						tingkat realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan 2022		tingkat capaian realisasi target renstra (%)				
											1						2		3		4		5		6				7
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	Rp.	K	%							
	2	15	01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota			7.321.831.200		3.207.260.592		915.459.000		902.794.900					-	4.110.055.492									
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		90	dok	150.000.0000	-	-	-	19	dok	30.000.000	12	30.000.000	100	100,00	19	dok	30.000.000	60	30.000.000	100	52			
2	15	01	2.01	0,1	Penyusunan dokumen perencanaanperangkat daerah	Penyusunan Dokumen Renstra, Renja Induk, Renja Perubahan, RKA Induk, RKA Perubahan, Profil OPD, PTK, PK Induk, PK Perubahan, RAK Induk dan RAK Perubahan (Dokumen)	55	dok	100.000.000	-	-	-	12	dok	20.000.00	12	20.000.00	100	100	12	dok	20.000.00	12	20.000.00	100				
	15	01	2.01	0,7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen LKPJ, LPPD, LKIP dan Evaluasi Renja Per	35	dok	50.000.000	-	-	-	7	dok	10.000.000	7	10.000.000	100	100	7	dok	10.000.000	7	10.000.000	100				

						Triwulan (Dokumen)																			
0																									
	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		145 Org/ bln	8.072.970.000	-	-	-	22	Org/ Bln	1.808.779.000		1.573.076.429	100	100,00	27	Org/bln	1.573.076.429	27	1.741.331.000	100	52
2	15	01	2.02	0,1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	110 Org/ bln	7.500.000.000	-	-	-	22	Org/ bln	1.584.945.440	22	1.556.483.160	100	98,00	20	Org/bln	1.458.482.429	20	1.628.381.000	100	60
2	15	01	2.02	0,3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor dan Lembur Pengelola APBD (Orang/Bulan)	35 Org/ bln	572.970.000	-	-	-	7	Org/ Bln	114.590.000	7	114.589.500	100	100,00	7	Org/bln	114.594.00	7	112.950.000	100	98
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		15 Org/ bln	75.000.000	-	-	-	3	Bln	15.000.000	3	15.000.000	100	100,00	100	100,00	15.000.000	3	15.000.000	100	41
2	15	01	2.03	0,2	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah (SKPD) (Orang/Bulan)	15 Org/ bln	75.000.000	-	-	-	3	Org/ Bln	15.000.000	3	15.000.000	100	100,00	3	Org/bln	15.000.000	3	15.000.000	100	115
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.950.000.000	-	-	-	26	Bln	390.000.000	26	356.250.000	100	91,00	100	100,00	390.000.000	26	390.000.000	100	97
2	15	01	2.05	0,3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Gaji Tenaga Kontrak Daerah (Orang/Bulan)	130 Org/ bln	1.950.000.000	-	-	-	26	Bln	390.000.000	26	356.250.000	100	91,00	26	Org/bln	390.000.000	26	390.000.000	100	78
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		60 bln	29.172.500	-	-	-	12	Bln	259.308.500	12	257.875.500	100	100,00	60	Bln	270.875.661	12	235.383.500	100	31
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen	tersedianya komponen	60 bln	7.000.000.000	-	-	-	12	Bln		12		100	100,00	12	Bln		12	1.580.000	100	31

					Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	penerangan kantor								2.000.000		2.000.000					1.358.800					
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60	blni	50.000.000	-	-	-	12	bln	14.999.800	12	14.746.800	100	98,00	12	10.000.000	10.000.000	12	12.009.000	100	123
2	15	01	2.06	07	Penyediaan bahan / Logistik	Tersedianya bahaLogistik kantor	60	bln	175.000.000	-	-	-	12	Bln	34.999.700	12	34.930.700	100	100,00	12	34.999.361	34.999.361	12	32.084.500	100	22
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	120	kali	448.500.000	-	-	-	21	Kali	207.310.000	21	206.198.000	100	99,00		194.833.000	194.833.000	12	189.710.000	100	148
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.930.000.000		-				26.918.000		24.265.310	100	100,00		39.975.533	43.012.000		26.800.000		
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor	60	bln	2.255.000.000	-	-	-	12	bln	2.006.000	12	2.000.000	100	100,00		2.013.000	2.014.000	65	1.200.000	100	12
2	15	01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi,sum ber Daya Air Listrik	terpeliharanya gedung kantor	60	bln	175.000.000	-	-	-	12	bln	26.918.000	12	22.265.310	100	93,00		37.962.533	40.998.000	4	25.600.000	100	45
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.000.000		-	-			398.170.000		387.722.836	100	100,00		367.722.636	398.170.000		132.340.000		
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa,Pemeliharaan Biaya ,Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya a jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (Unit)	150	unit	1.090.000.000	-	-	-	30	unit	393.170.000	30	382.722.836	100	97,00	30	382.722.836	393.170.000	30	132.340.000	100	100

2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (JALAN LLAJ)			3.788.000.000	-	-	8	377.6.6.500	8	376.403.000	100	100,00	8	25.000.000	25.000.000	8	155.000.000	100	
2	15	02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		100	%	1.118.570.000				-	-									
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya bangunan atau alat keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas (Unit)	100	%	1.118.570.000				147.606.500	147.507.500	100	100,00					130.000.000	100	100
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Tipe c																		
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi terminal fasilitas Utama dan pendukung							215.000.000		214.235.500	100	100,00							
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100	%	1.804.000.000	-	-	-	-	-	-	-							
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya a Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor (Kalibrasi Peralatan Pengujian)	60	Kali	180.000.000	-	-	-	-	-	-	-							

						(Unit)																				
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Operasi Terpadu Lalu lintas yang dilaksanakan	1000	Buah	1.804.000.000	-	-	-	8	kali	15.000.000	8	15.000.000	100	100,00	8	25.000.000	25.000.000	8	25.000.000	100	100
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					2.379.000.000		-			10.000.000	10.000.000					2.379.000.000		2.379.000.000			
2	15	03	2.12	15	Pengawasan Pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal		1	Pkt	45.000.000				1	dok	10.000.000		10.000.000	100	100,00	1	pkt	10.000.000	1	15.000.000	100	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penetapan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan bersarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pelaksanaan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis dan , 2 (dua) indikator kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 90,35% atau dikategorikan sangat tinggi

Pencapaian hasil realisasi kinerja tinggia Dinas Perhubungan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 20201 terhadap tahun 2019	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Penyediaan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan kabupaten	%	40,44	40,44	42,89	96,51	52,44	106,06	81,79
2.	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	297	395	570	84,19	1.057	144,30	53,93
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan						90,35	Sangat Tinggi		

Sumber data : Dinas Perhubungan Kab. Rote Ndao TA.2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran **Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Perhubungan** terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu *Jumlah uji KIR angkutan umum dan Penyediaan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan kabupaten.*

1. Penyediaan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan kabupaten.

Indikator Penyediaan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan kabupaten adalah Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan yang terpasang dibandingkan jumlah fasilitas keselamatan jalan yang direncanakan.

Fasilitas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi rambu - rambu, marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Lampu jalan alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan,serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dan diluar jalan seperti tempat parkir dan halte bus

2. Jumlah uji KIR angkutan umum.

Jumlah Uji KIR angkutan Umum merupakan Jumlah Uji KIR bagi angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan pada tahun n-1 tambah tahun n. Pengujian terhadap setiap angkutan umum yang diimpor baik yang dibuat dan atau di rakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.pengujian dimaksud meliputi uji tipe (pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan) dan uji berkala (pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji) .

Jumlah Uji Kir Angkutan Umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

Pada tahun 2022 Uji Kir Angkutan Umum yang dilaksanakan sebanyak 570 unit kendaraan dari 677 unit yang ditargetkan.

TABEL T-C-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022

No	Indikator	Target SPM/standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah								Realisasi Capaian				Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
				K	sat	K	sat	K	sat	K	sat	K	sat	K	sat	K	sat	K	sat	
1	Penyediaan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan kabupaten		✓	44,44	%	48,44	%	52,44	%	52,44	%	42,89	%		%	52,44	%	52,44	%	
2.	Jumlah uji KIR angkutan umum		✓	677	unit	867	unit	1057	unit	1057	unit	570	unit		unit	1057	unit	1057	unit	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas melaksanakan wewenang otonomi daerah di Bidang Perhubungan dengan Tugas Pokok dan fungsi :

1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;
2. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten Rote Ndao dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan;
3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi;
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat / fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur;
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi;
7. Selalu cermat dan tanggap atas kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao menunjukan *Strengths* maupun *weakness* sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Tersedianya Pegawai
- 2) Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas
- 3) Adanya *team work* antar staf yang baik
- 4) Tersedianya sarana kerja yang memadai
- 5) Adanya komitmen pimpinan
- 6) Tersedianya dana penunjang

b. Kelemahan (*weakness*)

- 1) Rendahnya kapasitas dan kapabilitas professional aparatur di bidang Perhubungan.
- 2) Kurang meratanya beban kerja
- 3) Kurangnya pelaksanaan sistem monitoring, pengendalian dan evaluasi
- 4) Kurang efektif dan efisiennya pelaksanaan mekanisme koordinasi
- 5) Kurangnya kompetensi pejabat struktural sesuai basic pendidikan

Analisis terhadap lingkungan external Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao menunjukkan *Opportunity* maupun *Theart* sebagai berikut :

a. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Letak geografis yang strategis
- 2) Adanya support dari Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao

b. Tantangan (*Theart*)

- 1) Inkonsistensi terhadap penerapan regulasi
- 2) Belum adanya Tataran transportasi lokal (Tatralok)

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, Dinas Perhubungan dihadapkan pada beberapa isu penting yaitu :

1. Kurangnya jumlah tambatan/dermaga perahu untuk bongkar muat barang/orang.
2. Kurangnya sarana , prasarana dan fasilitas LLAJ dan Masih rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam mematuhi aturan tentang lalu lintas angkutan jalan.
3. Keterbatasan ruang parkir ditepi jalan umum dan parkir khusus serta pesatnya kenaikan kendaraan bermotor.
4. Terbatasnya alat transportasi darat, laut dan udara untuk aksesibilitas barang maupun orang dari dan ke Rote Ndao.

Dalam menyikapi isu-isu tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao menempuh beberapa strategi diantaranya adalah

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
1. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

b. Sarana dan Prasarana

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

c. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun Juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Rote Ndao menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarnya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.

d. Masih tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas

Meningkatnya jaminan keselamatan pelayanan transportasi umum guna Peningkatan keselamatan transportasi, ini berkaitan dengan isu internasional yaitu *Road Map Zero to Accident* diupayakan dengan meningkatkan jaminan keselamatan transportasi pemeliharaan infrastruktur dan prasarana lalu lintas, untuk mendukung pembangunan dan memperkuat perekonomian rakyat yaitu dengan melakukan Penertiban Angkutan Umum dan Penertiban Angkutan sungai, Pengadaan rambu lalu lintas, dan melaksanakan Sosialisasi keselamatan/kebijakan/peraturan transportasi.

e. Meningkatkan pelayanan transportasi umum/massal

Masih sulitnya masyarakat menggunakan angkutan umum untuk keluar daerah ini menimbulkan pergerakan perekonomian masyarakat menjadi lambat sehingga Upaya menciptakan kemudahan menggunakan transportasi umum/massal guna peningkatan pelayanan transportasi, hal tersebut dilakukan dengan Meningkatkan pelayanan transportasi umum/massal.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan

yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Hasil dari kegiatan Musrembang baik dari tingkat desa hingga Kecamatan tidak termuat di dalam Rencana kerja yang disiapkan untuk menampung aspirasi masyarakat yang disebabkan karena keterbatasan dari dana Pemerintah sehingga dilakukan penundaan kegiatan diakibatkan kebutuhan lain yang lebih penting sehingga masyarakat merasa dikesampingkan.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan yang memang dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao yang membantu Bupati Rote Ndao dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah dasar bagi setiap OPD dalam menyusun rancangan RENJA OPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan.

TABEL T-C-31
Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	2	3	4	4 K	5 Rp.	2	3	4	4 K	5 Rp.	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota				3.160.149.800	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota				3.160.149.800	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ronda	terlaksananya pelayanan administrasi kantor	22 dok	30.000.000		Kab. Ronda	terlaksananya pelayanan administrasi kantor	12 dok	30.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ronda	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	12 dok	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ronda	tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (dokumen)	12 dok	20.200.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ronda	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 dok	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ronda	Tersusunnya Dokumen LKPJ, LPPD, LKIP dan Evaluasi Renja Per Triwulan (Dokumen)	7 dok	30.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ronda		12 bln	1.808.779.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ronda	Terdukungnya aktifitas pengelolaan keuangan	12 bln	1.808.779.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ronda	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 bln	1.694.185.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ronda	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	12 bln	19.800.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Ronda	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	12 bln	114.594.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Ronda	Tersedianya Honor dan Lembur Pengelola APBD	12 bln	8.950.000	

								(Orang/Bulan)			
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ronda		12 bln	15.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Ronda	meningkatnya layanan administrasi perkantoran (orang/bulan)	12 bln	15.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Ronda	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	12 bln	15.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Ronda	Tersedianya Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah (SKPD) (Orang/Bulan)	12 bln	15.000.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Ronda		26 bln	390.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Ronda	meningkatnya layanan administrasi perkantoran (orang/bulan)	26	390.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Ronda	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	26 bln	390.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Ronda	Tersedianya Gaji Tenaga Kontrak Daerah (Orang/Bulan)	26 bln	390.000.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ronda		100 %	304.282.250,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ronda	Terlaksananya jasa administrasi perkantoran perangkat daerah (bulan)	100 %	304.282.250,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakanPenggunaan	12 bln	1.358.800,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ronda	Tersedianya Komponen listrik/penerangan kantor (Bulan)	12 bln	1.358.800,00	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3 unit	40.000.000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kab. Ronda	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit	40.000.000	
	Penyediaan Bahan Materil Kantor	Kab. Ronda	Jumlah paket bahan / materil yang disediakan	12 bln	34.999.450,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Rote Ndao	Tersedianya alat tulis kantor dan jasa kebersihan kantor (Bulan)	12 bln	34.999.450,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	21 kali	10.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Ronda Kab. Ronda	Tersedianya Barang Cetak dan	12 bln	10.000.000,00	

			<i>disediakan</i>					<i>Penggandaan (Bulan)</i>			
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		<i>Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah (Kali)</i>	21 kali	217.924.000,00	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kab. Ronda	<i>Terlaksananya a Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah (Kali)</i>	21 kali	217.924.000,00	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				43.012.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Terlaksananya a jasa administrasi perkantoran perangkat daerah (bulan)</i>		304.282.250,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		<i>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 bln	2.014.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ronda	<i>Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Bulan)</i>	12 bln	2.014.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		<i>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	12 bln	40.998.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ronda	<i>Terlaksananya a Pembayaran Rekening Telepon/Internet, Listrik dan Air (Bulan)</i>	12 bln	40.998.000,00	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				437.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				437.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		<i>Jumlah kendaraan perongan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya</i>	3 unit	427.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ronda	<i>Terlaksananya a jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan , pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (Unit)</i>	3 unit	427.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		<i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi asi gedung kantor dan bangunan lainnya (Unit)</i>	2 unit	10.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ronda	<i>Terlaksananya a Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	2 unit	10.000.000,00	

								(Unit)			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				430.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				430.000.000	
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Ronda	Tersedianya bangunan atau alat keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas (Unit)	100 %	150.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Ronda	Tersedianya bangunan atau alat keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas (Unit)	100 %	150.000.000	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Ronda	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu lalu Lintas (Unit)	50 mtr	150.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Ronda	Terlaksananya a Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu lalu Lintas (Unit)	50 mtr	150.000.000	
8	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Ronda	Tersedianya Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang (Gas Analyzer), Alat Uji Ketebalan Asap Gas Buang (Smoke Tester), Alat Uji Penunjuk Kecepatan (unit)	100 %	280.000.000,00	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Ronda	Tersedianya Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang (Gas Analyzer), Alat Uji Ketebalan Asap Gas Buang (Smoke Tester), Alat Uji Penunjuk Kecepatan (unit)	100 %	280.000.000,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Ronda	Terlaksananya Pengadaan alat uji (SIM PKB) (Unit)	1 pkt	200.000.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Ronda	Terlaksananya a Pengadaan alat uji (SIM PKB) (Unit)	1 pkt	200.000.000,00	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Ronda	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor (Kalibrasi Peralatan	3 unit	50.000.000,00	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Ronda	Terlaksananya a Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian	3 unit	50.000.000,00	

			Pengujian) (Unit)					berkala kendaraan bermotor (Kalibrasi Peralatan Pengujian) (Unit)			
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Ronda	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor (Kali)	8 kli	30.000.000,00	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Ronda	Terlaksananya a Monitoring dan evaluasi penyelenggar aan pengujian berkala kendaraan bermotor (Kali)	8 kli	30.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				60.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				60.000.000	
9	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Ds. Sanggaoen	Meningkatnya prasarana pelabuhan laut (%)	100 %	60.000.000	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Ds. Sanggaoen	Meningkatny a prasarana pelabuhan laut (%)	100 %	60.000.000	
	Meningkatnya prasarana pelabuhan laut (%)	Kab. Rote Ndao	Terlaksananya Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal (Dokumen)	1 pkt	60.000.000	Meningkatnya prasarana pelabuhan laut (%)	Kab. Rote Ndao	Terlaksananya a Pengawasan pengoperasia n pelabuhan pengumpan lokal (Dokumen)	1 pkt	60.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan musrenbang diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan kabupaten. Melalui forum ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Akan tetapi usulan yang masuk terlalu banyak dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah , maka perlu penelaahan dan skala prioritas terhadap usulan yang ada.

Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao meliputi Bidang Perhubungan Darat, Bidang Perhubungan Laut dan Udara, pada umumnya dalam musrenbang menampung kebutuhan masyarakat yang telah direalisasi berdasarkan skala prioritas berupa :

1. Pembangunan Tambatan Perahu/pelabuhan rakyat/dermaga rakyat
2. Pemasangan pagar pengaman jalan, rambu lalu lintas, delinator, halte bus, marka jalan pada kawasan persekolahan, rumah ibadah, dan pada lokasi rawan kecelakaan pada titik tertentu
3. Penertiban angkutan umum melalui kegiatan operasi terpadu lalu lintas dan uji petik kendaraan bermotor
4. Penertiban parkir kendaraan pada badan jalan perkotaan dan pasar-pasar.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional di Bidang Perhubungan, Pemerintah telah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui penyusunan standar pelayanan minimal guna menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada masyarakat agar penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah sinergi dengan tujuan , Provinsi dan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional

NO	KEBIJAKAN		
	Kabupaten	Provinsi	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan jalan mantap status dan non status, serta mendorong peran aktif pihak swasta dalam penyediaan transportasi yang layak	Perbaikan infrastruktur untuk mempercepat peningkatan akses masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk pengurangan kemiskinan	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
2	Pengembangan sistem transportasi terpadu yang menjangkau pusat-pusat produksi di perdesaan dan daerah parawisata		Peningkatan kualitas pelayanan publik

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Rote Ndao yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 adalah :

1. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat/stake holder ;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan tentang pembangunan di Kabupaten Rote Ndao ;
3. Meningkatkan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Rote Ndao

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 adalah :

1. Meningkatnya penyediaan perlengkapan di jalan kabupaten /Kota
2. Terciptanya kelancaran arus transportasi orang dan barang.
3. Terciptanya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lalu lintas dan angkutan
4. Terciptanya kesadaran masyarakat pengguna fasilitas jalan dan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Dinas Perhubungan sebagai OPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan. Dikaitkan dengan Visi Misi Bupati /Wakil Bupati Rote Ndao dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 -2024 serta Urusan pemerintahan yang diselenggarakan.

maka fungsi Dinas Perhubungan terkait dengan pencapaian Misi **3** yaitu :***“Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan”***. dengan ketersediaan jalan dan jembatan, sarana pengairan, drainase, jaringan listrik, dermaga, Bandar Udara, Pelabuhan rakyat, perluasan cakupan pelayanan air bersih dan bantuan rumah rakyat dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao mendukung agenda tersebut dengan : program yang berkaitan dengan urusan Perhubungan.

Program merupakan kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan skala prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi OPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah melingkupi 3 Program dan 9 Kegiatan dan 16 sub kegiatan , dengan total pagu indikatif sebesar Rp.2.522.954.500,- lebih fokus kepada masyarakat nelayan dan masyarakat pengguna jalan raya di Kabupaten Rote Ndao.

TABEL T-C-33
RUMUSAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.936.954.500				2.936.954.500,00
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				2.936.954.500				2.936.954.500,00
1.	2.16.2-16.2-20.2- 21.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran (%)		100	2.581.954.500			100	2.581.954.500,00
	2.16.2-16.2-20.2- 21.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab.RoteNdao		30.000.000			12	30.000.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)		12	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			20.000.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab.RoteNdao	7	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7	10.000.000
	2.16.2-16.2-20.2- 21.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.741.331.000				1.741.331.000

			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab.RoteNdao	12				12	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab.RoteNdao	22	1.628.381.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		22	1.628.381.000,00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penetausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Kab.RoteNdao	12	112.950.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12	112.950.000,00
	2.16.2-16.2-20.2-21.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				15.000.000				15.000.000
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	Kab.RoteNdao	12	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12	15.000.000
	2.16.2-16.2-20.2-21.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				390.000.000				390.000.000
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kab.RoteNdao	12	390.000.000			12	390.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya SDM ASN berdasarkan Tugas dan Fungsi		-	-			-	-

			Meningkatnya SDM ASN berdasarkan Tugas dan Fungsi		-	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		-	-
	2.16.2-16.2-20.2- 21.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab.RoteNdao		246.483.500				246.483.500
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakanPenggandaan		1	1.580.000			1	1.580.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan		1	11.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1	11.100.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		1	12.009.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1	12.009.000
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan / materil yang disediakan		1	32.084.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1	32.084.500
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		80	189.710.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		80	189.710.000
	2.16.2-16.2-20.2- 21.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab.RoteNdao		26.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			26.800.000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	1.200.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12	1.200.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	25.600.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12	25.600.000
	2.16.2-16.2-20.2- 21.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab.RoteNdao	30	132.340.000			30	132.340.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perongan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya		30	132.340.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		30	132.340.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		0	0			0	0

2.	2.15.2-15.0-0.0-0.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			100	165.000.000			100	165.000.000
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				130.000.000				130.000.000
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.05	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab.RoteNdao	37	130.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		37	130.000.000	
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			25.000.000				25.000.000	
				100				100		
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Kab.RoteNdao	10	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10	25.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
		Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor (Kalibrasi Peralatan Pengujian) (Unit)			-	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		-	-
2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota				10.000.000				10.000.000	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab/Kota									
		Jumlah laporan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Kab.RoteNdao	12	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12	10.000.000	

3.	2.15.2-15.0-0.0-0.01.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			100	190.000.000			100	190.000.000
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.03.2.04	Pembangunan dan penertiban izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 kabupaten /kota				10.000.000				10.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten / kota kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kewenangan kabupaten/kota	Kab.RoteNdao	1	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1	10.000.000
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.03.2.07	Penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebrangan dalam daerah kabupaten/kota				20.000.000				20.000.000
		Penyediaan data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebrangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebrangan dalam daerah kabupaten / kota	Kab.RoteNdao	1	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1	10.000.000
		Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebrangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebrangan dalam daerah kabupaten/kota		1	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1	10.000.000
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				160.000.000				160.000.000
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah laporan Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal (Dokumen)	Kab.RoteNdao	1	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1	10.000.000
		Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan pengumpan lokal	Jumlah fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan pengumpan lokal yang tersedia	Kab.RoteNdao	20	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		20	150.000.000
	J U M L A H					2.936.954.500				2.936.954.500

BAB IV

RENCANA KERJA DA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sumber dana indikatif yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Program/kegiatan Tahun 2024 direncanakan berasal dari Sumber Dana Alokasi Umum (DAU/APBD). Jumlah dana dibutuhkan sebesar Rp. 2.936.954.500,- (Dua Miliar Sembilan ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) untuk membiayai 3 (tiga) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan dengan Rincian Sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao

Rencana Kerja Tahun 2024				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Pagu Dana (Rp)	Sumber Dana
A	Program penunjang urusan pemerintahan		2.357.954.500	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. ronda	30.000.000	DAU
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. ronda	1.733.331.000	DAU
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. ronda	15.000.000	DAU
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. ronda	0	DAU
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. ronda	62.823.500	DAU
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. ronda	26.800.000	DAU
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. ronda	100.000.000	DAU
B	Program penyelenggaraan lalu lintas jalan (LLAJ)		145.000.000	
8.	Pemeliharaan Fasilitas perlengkapan jalan	Kab. ronda	125.000.000	DAU
9.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. ronda	10.000.000	DAU
10	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan kabupaten/kota	Kab. ronda	10.000.000	
C	Program Pengelolaan pelayaran		10.000.000	
11	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. ronda	10.000.000	
TOTAL ANGGARAN RENJA 2024			2.936.954.500	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 - 2024, sehingga dokumen ini menjadi sangat strategis karena menjembatani antara kepentingan perencanaan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah namun tetap mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Rencana Kinerja ini adalah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024. Untuk pelaksanaan pembangunan jangka pendek (tahunan) dijabarkan dalam APBD setiap tahunnya. Dalam dokumen ini secara umum telah memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja, kegiatan disini yang masih diperlukan penyempurnaan guna peningkatan capaian kinerja.

Ba'a, 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Rote Ndao



ELIAS TALOMANAFE, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19660413 198903 1 012